



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/152/M.SM.04.00/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan nilai jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;
7. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palangka Raya.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
9. Tugas adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang.
10. Uraian Tugas adalah paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Ikhtisar Jabatan adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan tugas jabatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta Administrasi Pemerintahan dan pembangunan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
19. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
20. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
21. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi yang ditentukan berdasarkan Peraturan mengenai nomenklatur jabatan pelaksana dari kementerian yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.

BAB III EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan *Factor Evaluation System (FES)*.
- (2) Hasil evaluasi jabatan berupa bobot/nilai jabatan, klasifikasi, dan kelas jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi ASN.
- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Manajerial/Struktural; dan
 - b. Jabatan Non-Manajerial/Non Struktural.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:

- a. Jabatan Manajerial meliputi:
 - 1) ruang lingkup dan dampak;
 - 2) pengaturan organisasi;
 - 3) wewenang;
 - 4) sifat hubungan;
 - 5) kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - 6) kondisi lain.
- b. Jabatan Non-Manajerial meliputi:
 - 1) pengetahuan dan keahlian;
 - 2) pengawasan;
 - 3) pedoman kerja;
 - 4) kompleksitas;
 - 5) ruang lingkup dan dampak;
 - 6) hubungan interpersonal;
 - 7) tujuan hubungan;
 - 8) tuntutan fisik; dan
 - 9) lingkungan kerja.

Pasal 5

- (1) Penilaian untuk kelas Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap pejabat struktural.
- (2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manajerial/Non-Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap ASN.

Pasal 6

Nomenklatur jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional harus sesuai dengan struktur organisasi, analisa jabatan dan analisa beban kerja masing-masing jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya dan atau Surat Keputusan Walikota Palangka Raya.

BAB IV
USUL EVALUASI JABATAN BARU

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru dibuat setelah melalui usul evaluasi jabatan dan mendapat persetujuan dari Kementerian yang berwenang.
- (2) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru apabila :
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
 - c. hal-hal yang menyebabkan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (3) Selama proses usul evaluasi jabatan baru, organisasi yang sudah mengalami perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi baik dari jabatan struktural dan pelaksana akan disesuaikan kelas jabatan sebagaimana pada Lampiran.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku saat jabatan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penetapan Kelas dan nilai jabatan untuk Jabatan Fungsional melalui prosedur penyetaraan jabatan disetarakan dengan Kelas dan Nilai Jabatan Administrasi sebelumnya sampai ditetapkannya ketentuan mengenai penghasilan Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 April 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TABEL KELAS DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	NILAI JABATAN	RANGE KELAS JABATAN	KELAS JABATAN
SEKRETARIS DAERAH	3555	3155-3600	15
1. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH 2. INSPEKTUR 3. KEPALA BADAN URUSAN PERENCANAAN 4. KEPALA BADAN URUSAN KEUANGAN	3030	2755-3150	14
1. SEKRETARIS DPRD 2. KEPALA BADAN 3. KEPALA PELAKSANA BPBD 4. KEPALA DINAS 5. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2865	2755-3150	14
STAFF AHLI WALIKOTA	2715	2355-2750	13
1. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2. CAMAT	2315	2105-2350	12
1. SEKRETARIS INSPEKTORAT 2. SEKRETARIS BADAN URUSAN PERENCANAAN 3. SEKRETARIS BADAN URUSAN KEUANGAN	2140	2105-2350	12
1. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD 2. SEKRETARIS DINAS 3. SEKRETARIS BADAN 4. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2115	2105-2350	12
SEKRETARIS KECAMATAN	2090	1855-2100	11
1. KEPALA BIDANG PADA DINAS 2. KEPALA BIDANG PADA BADAN 3. KEPALA BIDANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4. DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT	2045	1855-2100	11
INSPEKTUR PEMBANTU	1990	1855-2100	11
LURAH	1540	1355-1600	9
1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN 2. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, KEUANGAN DAN ASET PADA KECAMATAN 3. KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	1455	1355-1600	9
1. KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2. KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD 3. KEPALA SUB BAGIAN PADA PERANGKAT DAERAH 4. KEPALA SEKSI PADA DINAS 5. KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN 6. KEPALA SEKSI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7. KEPALA UPTD PADA DINAS	1430	1355-1600	9

8. KEPALA UPTD PADA BADAN			
9. KEPALA SUB BAGIAN PADA UPTD RUMAH SAKIT			
10. KEPALA SEKSI PADA UPTD RUMAH SAKIT			
SEKRETARIS KELURAHAN	1320	1105-1350	8
1. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPTD DINAS	1295	1105-1350	8
2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPTD BADAN			
3. KEPALA SEKSI PADA KELURAHAN			

NAMA JABATAN FUNGSIONAL	NILAI JABATAN	RANGE KELAS JABATAN	KELAS JABATAN
AUDITOR UTAMA	2820	2755-3150	14
DOKTER UTAMA	2805	2755-3150	14
1. PENGAWAS SEKOLAH UTAMA	2585	2355-2750	13
2. GURU UTAMA			
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MADYA	2240	2105-2350	12
1. DOKTER MADYA	2225	2105-2350	12
2. DOKTER GIGI MADYA			
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MADYA	2220	2105-2350	12
AUDITOR MADYA	2250	2105-2350	12
INSTRUKTUR MADYA	2200	2105-2350	12
POLISI PAMONG PRAJA MADYA	2085	1855-2100	11
PENATA ANESTESI MADYA	2055	1855-2100	11
1. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MADYA	2030	1855-2100	11
2. PENYULUH PERTANIAN MADYA			
1. GURU MADYA	1960	1855-2100	11
2. PENGAWAS SEKOLAH MADYA			
3. PERAWAT MADYA			
4. PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI DAN MULUT MADYA			
5. PSIKOLOG KLINIS MADYA			
APOTEKER MADYA	1945	1855-2100	11
1. ADMINISTRATOR KESEHATAN MADYA	1930	1855-2100	11
2. BIDAN MADYA			
3. ENTOMOLOG KESEHATAN MADYA			
4. EPIDEMIOLOG KESEHATAN MADYA			
5. FISIOTERAPIS MADYA			
6. MEDIK VETERINER MADYA			
7. NUTRISIONIS MADYA			
8. PAMONG BELAJAR MADYA			
9. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA MADYA			
10. PENERA MADYA			
11. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) MADYA			
12. PENILIK MADYA			
13. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MADYA			
14. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA			
15. PUSTAKAWAN MADYA			
16. SANITARIAN MADYA			
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA	1810	1605-1850	10
SANDIMAN MUDA	1795	1605-1850	10
MANGGALA INFORMATIKA MUDA	1780	1605-1850	10
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA	1770	1605-1850	10
1. PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MUDA	1750	1605-1850	10
2. PENGANTAR KERJA MUDA			

1. ANALIS KEBIJAKAN MUDA 2. ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA 3. ANALIS SDM APARATUR MUDA 4. PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA 5. PENGAWAS KOPERASI MUDA 6. PENGAWAS PERDAGANGAN MUDA	1735	1605-1850	10
1. DOKTER MUDA 2. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA	1720	1605-1850	10
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MUDA	1695	1605-1850	10
1. DOKTER GIGI MUDA 2. INSTRUKTUR MUDA	1670	1605-1850	10
AUDITOR MUDA	1655	1605-1850	10
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MUDA	1640	1605-1850	10
PERENCANA MUDA	1610	1605-1850	10
PENATA ANESTESI MUDA	1600	1355-1600	9
DOKTER PERTAMA	1570	1355-1600	9
1. ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MUDA 2. ASESSOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MUDA 3. ENTOMOLOG KESEHATAN MUDA 4. EPIDEMIOLOG KESEHATAN MUDA 5. FISIKAWAN MEDIS MUDA 6. FISIOTERAPIS MUDA 7. NUTRISIONIS MUDA 8. PAMONG BUDAYA MUDA 9. PENERA MUDA	1555	1355-1600	9
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	1550	1355-1600	9
PELATIH OLAHRAGA MUDA	1505	1355-1600	9
1. PENGELOLA KESEHATAN IKAN MUDA 2. ANALIS AKUAKULTUR MUDA	1490	1355-1600	9
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA	1480	1355-1600	9
ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MUDA	1460	1355-1600	9
PAMONG PRAJA MUDA	1445	1355-1600	9
ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PENYELIA	1440	1355-1600	9
ANALIS KEBAKARAN MUDA	1415	1355-1600	9
1. PENATA KADASTRAL MUDA 2. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA 3. TEKNIK PENGAIRAN MUDA 4. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA 5. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN MUDA	1400	1355-1600	9
1. GURU MUDA 2. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA 3. PENGAWAS SEKOLAH MUDA 4. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA 5. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA 6. PENYULUH PERIKANAN MUDA 7. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA 8. PENYULUH PERTANIAN MUDA 9. PENYULUH SOSIAL MUDA 10. PERAWAT MUDA	1385	1355-1600	9

11. PERAWAT GIGI MUDA/ TERAPIS GIGI DAN MULUT MUDA			
12. PSIKOLOG KLINIS MUDA	1385	1355-1600	9
SANDIMAN PENYELIA	1380	1355-1600	9
1. APOTEKER MUDA 2. DOKTER GIGI PERTAMA 3. SANITARIAN MUDA	1370	1355-1600	9
1. ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN MUDA 2. ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA 3. ANALIS HUKUM MUDA 4. ANALIS KEBENCANAAN MUDA 5. ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA 6. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MUDA 7. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MUDA 8. ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MUDA 9. ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN MUDA 10. ARSIPARIS MUDA 11. AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA 12. BIDAN MUDA 13. MEDIK VETERINER MUDA 14. PAMONG BELAJAR MUDA 15. PEKERJA SOSIAL MUDA 16. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA MUDA 17. PEMBINA INDUSTRI MUDA 18. PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN MUDA 19. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA 20. PENATA PERTANAHAN MUDA 21. PENATA RUANG MUDA 22. PENELITI MUDA 23. PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA 24. PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA 25. PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA 26. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA 27. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA 28. PENGAWAS MUTU PAKAN MUDA 29. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) MUDA 30. PENGAWAS PERIKANAN MUDA 31. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MUDA 32. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MUDA 33. PENGUJI MUTU BARANG MUDA 34. PENILAI PEMERINTAH MUDA 35. PENILIK MUDA 36. PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MUDA 37. PERENCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA 38. PEREKAYASA MUDA 39. PERISALAH LEGISLATIF MUDA 40. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA 41. PRANATA KOMPUTER MUDA 42. PRANATA LABORATORIUM KEMTROLOGIAN MUDA 43. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA	1355	1355-1600	9

44. PUSTAKAWAN MUDA			
45. STATISTISI MUDA			
46. SURVEYOR PEMETAAN MUDA			
PENATA ANESTESI PERTAMA	1340	1105-1350	8
1. PENATA KADASTRAL PERTAMA	1325	1105-1350	8
2. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA			
3. TEKNIK PENGAIRAN PERTAMA			
4. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PERTAMA			
5. TEKNISI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERTAMA			
POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	1320	1105-1350	8
1. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	1310	1105-1350	8
2. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA			
3. PENYULUH PERIKANAN PERTAMA			
4. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA			
5. PENYULUH PERTANIAN PERTAMA			
6. PENYULUH SOSIAL PERTAMA			
7. PERAWAT PERTAMA			
8. PERAWAT GIGI PERTAMA/ TERAPIS GIGI DAN MULUT PERTAMA			
9. PERISALAH LEGISLATIF PERTAMA			
10. PSIKOLOG KLINIS PERTAMA			
1. ANALIS KEBAKARAN PERTAMA	1295	1105-1350	8
2. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PERTAMA			
3. APOTEKER PERTAMA			
4. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PERTAMA			
5. PENGUJI MUTU BARANG PERTAMA			
6. SANDIMAN PERTAMA			
7. SANITARIAN PERTAMA			
1. TEKNISI AKUAKULTUR PERTAMA	1290	1105-1350	8
2. ASISTEN PENATA ANESTESI PENYELIA			
1. ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN PERTAMA	1280	1105-1350	8
2. ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA			
3. ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF PERTAMA			
4. ANALIS HUKUM PERTAMA			
5. ANALIS KEBENCANAAN PERTAMA			
6. ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA			
7. ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA			
8. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PERTAMA			
9. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PENYELIA			
10. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PERTAMA			
11. ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTAMA			
12. ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PERTAMA			
13. ANALIS SDM APARATUR PERTAMA			
14. ARSIPARIS PERTAMA			
15. ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA			
16. AUDITOR PERTAMA			
17. AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA			
18. BIDAN PERTAMA			

19. ENTOMOLOG KESEHATAN PERTAMA			
20. EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA			
21. FISIOTERAPIS PERTAMA			
22. GURU PERTAMA			
23. INSTRUKTUR PERTAMA			
24. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA			
25. MEDIK VETERINER PERTAMA			
26. NUTRISIONIS PERTAMA			
27. PAMONG BELAJAR PERTAMA			
28. PEKERJA SOSIAL PERTAMA			
29. PELATIH OLAHRAGA PERTAMA			
30. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PERTAMA			
31. PEMBINA INDUSTRI PERTAMA			
32. PEMBINA JASA KONSTRUKSI PERTAMA			
33. PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PERTAMA			
34. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA PERTAMA			
35. PENATA PERTANAHAN PERTAMA			
36. PENATA RUANG PERTAMA			
37. PENELITI PERTAMA			
38. PENERA PERTAMA			
39. PENGANTAR KERJA PERTAMA			
40. PENGAWAS BENIH TANAMAN PERTAMA			
41. PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA			
42. PENGAWAS KEMETROLOGIAN PERTAMA			
43. PENGAWAS KOPERASI PERTAMA			
44. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA			
45. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PERTAMA			
46. PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA			
47. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) PERTAMA			
48. PENGAWAS PERDAGANGAN PERTAMA			
49. PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA			
50. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA			
51. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PERTAMA			
52. PENILAI PEMERINTAH PERTAMA			
53. PENILIK PERTAMA			
54. PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA			
55. PERENCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA			
56. PEREKAYASA PERTAMA			
57. PERENCANA PERTAMA			
58. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA			
59. PRANATA KOMPUTER PERTAMA			
60. PRANATA LABORATORIUM KEMTROLOGIAN PERTAMA			
61. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA			
62. PUSTAKAWAN PERTAMA			
63. STATISTISI PERTAMA			
64. SURVEYOR PEMETAAN PERTAMA			
65. TEKNISI ELEKTROMEDIS PERTAMA			
1. PENATA LAKSANA BARANG MAHIR	1275	1105-1350	8
2. PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA			
1. PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA	1270	1105-1350	8

2. POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA			
PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN PERTAMA	1265	1105-1350	8
1. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PENYELIA 2. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PENYELIA 3. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA 4. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA 5. PENYULUH PERIKANAN PENYELIA 6. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENYELIA 7. PENYULUH PERTANIAN PENYELIA 8. PERAWAT GIGI PENYELIA/ TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA 9. PERAWAT PENYELIA 10. PEREKAM MEDIS PENYELIA 11. RADIOGRAFER PENYELIA 12. REFRAKSIONIS OPTISIEN PENYELIA 13. TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA 14. TEKNISI KESEHATAN IKAN PENYELIA	1260	1105-1350	8
1. ASISTEN APOTEKER PENYELIA 2. ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PENYELIA 3. PENGELOLA KESEHATAN IKAN PERTAMA 4. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PENYELIA 5. PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA 6. SANITARIAN PENYELIA	1245	1105-1350	8
1. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTAMA 2. ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERTAMA	1235	1105-1350	8
1. ARSIPARIS PENYELIA 2. BIDAN PENYELIA 3. FISIOTERAPIS PENYELIA 4. INSTRUKTUR PENYELIA 5. NUTRISIONIS PENYELIA 6. OKUPASI TERAPIS PENYELIA 7. OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PENYELIA 8. PAMONG BUDAYA PENYELIA 9. PARAMEDIK VETERINER PENYELIA 10. PEKERJA SOSIAL PENYELIA 11. PENERA PENYELIA 12. PENGAMAT TERA PENYELIA 13. PENGANTAR KERJA PENYELIA 14. PENGAWAS BENIH TANAMAN PENYELIA 15. PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA 16. PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA 17. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PENYELIA 18. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA 19. PRANATA KOMPUTER PENYELIA 20. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 21. PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA 22. PUSTAKAWAN PENYELIA 23. STATISTISI PENYELIA 24. TERAPIS WICARA PENYELIA	1230	1105-1350	8

ANALIS AKUAKULTUR PERTAMA	1215	1105-1350	8
1. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB PERTAMA	1205	1105-1350	8
2. ANALIS KETAHANAN PANGAN PERTAMA			
MANGGALA INFORMATIKA PERTAMA	1190	1105-1350	8
PAMONG PRAJA MAHIR	1095	855-1100	7
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MAHIR	1080	855-1100	7
PENATA LAKSANA BARANG PELAKSANA	1070	855-1100	7
1. ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MAHIR	1035	855-1100	7
2. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PELAKSANA LANJUTAN			
3. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR			
4. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN			
5. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MAHIR			
6. PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN			
7. PERAWAT GIGI MAHIR/ TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR			
8. PERAWAT MAHIR			
9. PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR			
10. RADIOGRAFER MAHIR			
11. REFRAKSIONIS OPTISIEN MAHIR			
12. TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR			
1. ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	1020	855-1100	7
2. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAHIR			
3. PENGUJI MUTU BARANG MAHIR			
4. SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR			
5. TEKNISI KESEHATAN IKAN MAHIR			
ASISTEN PENATA ANESTESI MAHIR	1015	855-1100	7
1. ARSIPARIS PENYELIA	1005	855-1100	7
2. ASISTEN PELATIH OLAHRAGA MAHIR			
3. BIDAN MAHIR			
4. FISIOTERAPIS MAHIR			
5. INSTRUKTUR PELAKSANA LANJUTAN			
6. NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR			
7. OKUPASI TERAPIS MAHIR			
8. OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) MAHIR			
9. PAMONG BUDAYA MAHIR			
10. PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA LANJUTAN			
11. PEKERJA SOSIAL PELAKSANA LANJUTAN			
12. PENERA MAHIR			
13. PENGAMAT TERA MAHIR			
14. PENGANTAR KERJA PELAKSANA LANJUTAN			
15. PENGAWAS PERIKANAN MAHIR			
16. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MAHIR			
17. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR			
18. PRANATA KOMPUTER MAHIR			
19. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR			
20. PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR			
21. PUSTAKAWAN MAHIR			
22. STATISTISI MAHIR			
23. TERAPIS WICARA MAHIR			
PEMADAM KEBAKARAN MAHIR	1000	855-1100	7

SANDIMAN PELAKSANA/TERAMPIL	990	855-1100	7
TEKNISI AKUAKULTUR MAHIR	865	855-1100	7
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	840	655-850	6
ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	834	655-850	6
1. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL 2. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA 3. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERAMPIL 4. PERAWAT GIGI TERAMPIL/ TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL 5. PERAWAT TERAMPIL 6. PEREKAM MEDIS PELAKSANA 7. RADIOGRAFER TERAMPIL 8. REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL 9. TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	770	655-850	6
1. ASISTEN APOTEKER PELAKSANA 2. ASISTEN PELATIH OLAHRAGA TERAMPIL 3. PENGUJI MUTU BARANG PELAKSANA 4. SANITARIAN PELAKSANA/ TERAMPIL	755	655-850	6
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	745	655-850	6
1. ARSIPARIS TERAMPIL 2. BIDAN PELAKSANA/ TERAMPIL 3. FISIOTERAPIS TERAMPIL 4. INSTRUKTUR PELAKSANA 5. NUTRISIONIS PELAKSANA/ TERAMPIL 6. OKUPASI TERAPIS TERAMPIL 7. OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) TERAMPIL 8. PAMONG BUDAYA TERAMPIL 9. PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA 10. PEKERJA SOSIAL PELAKSANA 11. PENERA TERAMPIL 12. PENGAMAT TERA TERAMPIL 13. PENGANTAR KERJA PELAKSANA 14. PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL 15. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL 16. PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 17. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA/ TERAMPIL 18. PUSTAKAWAN TERAMPIL 19. STATISTISI TERAMPIL 20. TERAPIS WICARA TERAMPIL	740	655-850	6
1. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERAMPIL 2. ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TERAMPIL 3. TEKNISI AKUAKULTUR TERAMPIL 4. TEKNISI KESEHATAN IKAN TERAMPIL	720	655-850	6
PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	695	655-850	6
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PELAKSANA	690	655-850	6
PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	630	455-650	5
POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	580	455-650	5
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA	505	455-650	5
1. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PELAKSANA PEMULA	490	455-650	5

2. OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PELAKSANA PEMULA 3. PENGAMAT TERA PEMULA 4. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA PEMULA 5. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA PEMULA 6. PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA 7. STATISTISI PELAKSANA PEMULA			
--	--	--	--

NAMA JABATAN TUGAS TAMBAHAN	KELAS
KEPALA PUSKESMAS	DISESUAIKAN DENGAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS	DISESUAIKAN DENGAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL/PELAKSANA
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	DISESUAIKAN DENGAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	DISESUAIKAN DENGAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NAMA JABATAN PELAKSANA	NILAI JABATAN	RANGE KELAS JABATAN	KELAS JABATAN
1. ANALIS ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	890	855-1100	7
2. ANALIS ADVOKASI HUKUM			
3. ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR			
4. ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN			
5. ANALIS ANGKUTAN DARAT			
6. ANALIS APRESIASI KARYA SENI			
7. ANALIS ASET DAERAH			
8. ANALIS BADAN LAYANAN UMUM			
9. ANALIS BAHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA			
10. ANALIS BAHAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL			
11. ANALIS BAHAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
12. ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA			
13. ANALIS BAHAN PENGEMBANGAN INFORMASI PASAR KERJA			
14. ANALIS BAHAN PENGUPAHAN			
15. ANALIS BAHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS			
16. ANALIS BAHAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN			
17. ANALIS BAHAN PERSYARATAN KERJA			
18. ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN			
19. ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN			
20. ANALIS BENCANA			
21. ANALIS BENIH			
22. ANALIS BIMBINGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI			
23. ANALIS BINA KEHIDUPAN AGAMA			
24. ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN			

25.	ANALIS DAMPAK SOSIAL			
26.	ANALIS DATA DAN INFORMASI			
27.	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
28.	ANALIS DESA DAN KELURAHAN			
29.	ANALIS DIKLAT			
30.	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN			
31.	ANALIS DUNIA USAHA			
32.	ANALIS EKSPLORASI CAGAR BUDAYA			
33.	ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT			
34.	ANALIS GIZI			
35.	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA			
36.	ANALIS HUKUM			
37.	ANALIS HUMAS			
38.	ANALIS IDENTIFIKASI KERENTANAN SIBER			
39.	ANALIS IDEOLOGI			
40.	ANALIS JABATAN			
41.	ANALIS JALAN DAN JEMBATAN			
42.	ANALIS JAMINAN SOSIAL			
43.	ANALIS JASA KONSTRUKSI			
44.	ANALIS KEAMANAN			
45.	ANALIS KEBAKARAN			
46.	ANALIS KELEMBAGAAN			
47.	ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT			
48.	ANALIS KEMASYARAKATAN			
49.	ANALIS KEMITRAAN			
50.	ANALIS KEOLAHRAGAAN			
51.	ANALIS KEPEMUDAAN			
52.	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
53.	ANALIS KERJA SAMA			
54.	ANALIS KERJASAMA INDUSTRI			
55.	ANALIS KERJASAMA KEBUDAYAAN			
56.	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR			
57.	ANALIS KESEHATAN			
58.	ANALIS KESEHATAN KERJA			
59.	ANALIS KESEHATAN KELUARGA			
60.	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT			
61.	ANALIS KESIAPSIAGAAN			
62.	ANALIS KETAHANAN EKONOMI			
63.	ANALIS KETAHANAN KELUARGA			
64.	ANALIS KEUANGAN			
65.	ANALIS KINERJA			
66.	ANALIS KINERJA INDUSTRI			
67.	ANALIS KLASIFIKASI BARANG			
68.	ANALIS KOMPETENSI			
69.	ANALIS KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA			
70.	ANALIS KONTEN MEDIA SOSIAL			
71.	ANALIS KOPERASI			
72.	ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN			
73.	ANALIS LAHAN PERTANIAN			
74.	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA			
75.	ANALIS LAPORAN INVESTASI PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM			
76.	ANALIS LAPORAN KEUANGAN			

77.	ANALIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA		
78.	ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
79.	ANALIS LAYANAN UMUM		
80.	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP		
81.	ANALIS MASALAH SOSIAL		
82.	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		
83.	ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN		
84.	ANALIS OBAT DAN MAKANAN		
85.	ANALIS OBJEK WISATA		
86.	ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT		
87.	ANALIS PAJAK DAERAH		
88.	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
89.	ANALIS PANGAN		
90.	ANALIS PARIWISATA		
91.	ANALIS PARTAI POLITIK		
92.	ANALIS PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN		
93.	ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN		
94.	ANALIS PELAYANAN		
95.	ANALIS PELAYANAN PUBLIK		
96.	ANALIS PELAYANAN SOSIAL		
97.	ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA		
98.	ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN		
99.	ANALIS PEMBANGUNAN		
100.	ANALIS PEMBAYARAN PROGRAM PENSIUN		
101.	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
102.	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN		
103.	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK		
104.	ANALIS PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		
105.	ANALIS PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM		
106.	ANALIS PEMBINAAN UMAT		
107.	ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK		
108.	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH		
109.	ANALIS PENAGIHAN		
110.	ANALIS PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN		
111.	ANALIS PENAGIHAN PAJAK		
112.	ANALIS PENANAMAN MODAL		
113.	ANALIS PENATAAN KAWASAN		
114.	ANALIS PENDAMPINGAN BELAJAR		
115.	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT		
116.	ANALIS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN		
117.	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT		
118.	ANALIS PENGELOLAAN KOMODITAS PERKEBUNAN		
119.	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
120.	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN		
121.	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR		
122.	ANALIS PENGEMBANGAN JABATAN		
123.	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR		
124.	ANALIS PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK		
125.	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH		
126.	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA		
127.	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
128.	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR		

129.	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN		
130.	ANALIS PENGENDALIAN LAHAN		
131.	ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN		
132.	ANALIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA		
133.	ANALIS PENYAKIT MENULAR		
134.	ANALIS PERATURAN IKLIM USAHA		
135.	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
136.	ANALIS PERBENDAHARAHAAN		
137.	ANALIS PERDAGANGAN		
138.	ANALIS PEREKONOMIAN		
139.	ANALIS PERENCANAAN		
140.	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN		
141.	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA		
142.	ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		
143.	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN		
144.	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
145.	ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA		
146.	ANALIS PERIZINAN TRANSPORTASI		
147.	ANALIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN IKAN		
148.	ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
149.	ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
150.	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM		
151.	ANALIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
152.	ANALIS PERTANAHAN		
153.	ANALIS PERUMAHAN		
154.	ANALIS PESERTA DIDIK		
155.	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI		
156.	ANALIS PRASARANA PERKOTARAAN DAN PEDESAAN		
157.	ANALIS PROGRAM BEASISWA		
158.	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN		
159.	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN		
160.	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL		
161.	ANALIS PROGRAM PENYULUHAN		
162.	ANALIS PROTOKOL		
163.	ANALIS PUBLIKASI		
164.	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL		
165.	ANALIS RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI DARAT		
166.	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN		
167.	ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI		
168.	ANALIS RETRIBUSI DAERAH		
169.	ANALIS SAR		
170.	ANALIS SARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
171.	ANALIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL		
172.	ANALIS SINERGITAS PENUGASAN URUSAN PEMERINTAH		
173.	ANALIS SISTEM INFORMASI		
174.	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN		
175.	ANALIS SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN		
176.	ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN		
177.	ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN		

178.	ANALIS STANDARD HARGA		
179.	ANALIS STATISTIK		
180.	ANALIS SUMBER DAYA AIR		
181.	ANALIS SUMBER DAYA IKAN		
182.	ANALIS SUMBER MANUSIA APARATUR		
183.	ANALIS SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN		
184.	ANALIS TAMAN		
185.	ANALIS TATA KELOLA KEAMANAN SIBER		
186.	ANALIS TATA LAKSANA		
187.	ANALIS TATA PRAJA		
188.	ANALIS TATA USAHA		
189.	ANALIS TEKNIK DAN MATERI		
190.	ANALIS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN		
191.	ANALIS TOPONIMI DASN DATA WILAYAH		
192.	BENDAHARA		
193.	INVESTIGATOR		
194.	PEMERIKSA ANGGARAN		
195.	PEMERIKSA IRIGASI		
196.	PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN		
197.	PEMERIKSA KELISTRIKAN		
198.	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN		
199.	PEMERIKSA PERTANAHAN		
200.	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN		
201.	PENATA DOKUMEN HASIL PRODUKSI		
202.	PENATA KENDARAAN DINAS		
203.	PENATA KEUANGAN		
204.	PENATA LAPORAN KEUANGAN		
205.	PENATA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN		
206.	PENATA TEKNIS PENGAMANAN		
207.	PENELAAH BAHAN JALAN		
208.	PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN		
209.	PENELAAH DATA SERTIFIKASI MUTU BENIH ATAU BIBIT		
210.	PENELAAH DATA SUMBER BENIH		
211.	PENELAAH DATA SUMBER DAYA ALAM		
212.	PENELAAH DIFUSI DAN ALIH TEKNOLOGI		
213.	PENELAAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM		
214.	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARAN DAN JASA		
215.	PENELAAH LAIK FUNGSI PRASARANA FISIK		
216.	PENELAAH MUTU KONSTRUKSI		
217.	PENELAAH PEMOHON IJIN ANGKUTAN PENUMPANG		
218.	PENELAAH PENGELOLA LEGER JALAN		
219.	PENELAAH PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN		
220.	PENELAAH PERKEMBANGAN BUMD		
221.	PENELAAH RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN		
222.	PENELAAH RENCANA UMUM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI PERKOTAAN		
223.	PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR		
224.	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL		

225.	PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG		
226.	PENGAWAS BANGUNAN DAN TAMAN		
227.	PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN		
228.	PENGAWAS HARGA PANGAN		
229.	PENGAWAS IRIGASI		
230.	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN		
231.	PENGAWAS KELISTRIKAN		
232.	PENGAWAS KEPENDUDUKAN		
233.	PENGAWAS KESELAMATAN DARAT DAN JALAN		
234.	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH		
235.	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN JALAN, SALURAN DAN SELOKAN		
236.	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR		
237.	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS PERTAMANAN		
238.	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK		
239.	PENGAWAS MUTU HASIL PERKEBUNAN		
240.	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR		
241.	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS		
242.	PENGAWAS PELABUHAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU		
243.	PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
244.	PENGAWAS PEMANFAATAN TANAH		
245.	PENGAWAS PENANAMAN MODAL		
246.	PENGAWAS PENGAIRAN		
247.	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT		
248.	PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
249.	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN		
250.	PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI		
251.	PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK		
252.	PENGAWAS PERPUSTAKAAN		
253.	PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA		
254.	PENGAWAS SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
255.	PENGAWAS SARANA BENGKEL		
256.	PENGAWAS USAHA OPERASI PRODUKSI DAN PEMASARAN		
257.	PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI		
258.	PENGENDALI TEKNIS KEAMANAN		
259.	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI		
260.	PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKAT		
261.	PENGEVALUASI PELAYANAN ANGKUTAN		
262.	PENGEVALUASI PORGRAM DAN KINERJA		
263.	PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL, DAN BETON		
264.	PENYIDIK		
265.	PENYULUH BENCANA		
266.	PENYULUH BIMBINGAN ATAU KONSELING EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL		
267.	PENYULUH KEAMANAN MASYARAKAT		

268.	PENYULUH KEARSIPAN		
269.	PENYULUH KEPEMUDAAN		
270.	PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT		
271.	PENYULUH KOPERASI		
272.	PENYULUH ULAH RAGA		
273.	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK		
274.	PENYULUH PERPUSTAKAAN		
275.	PENYUSUN BAHAN ANGGOTA DEWAN		
276.	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM		
277.	PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA		
278.	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI		
279.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN		
280.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENGADBIAN MASYARAKAT		
281.	PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PELATIHAN		
282.	PENYUSUN BAHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		
283.	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA		
284.	PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN REGULASI		
285.	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG DAN INVENTARIS		
286.	PENYUSUN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN		
287.	PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT		
288.	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN		
289.	PENYUSUN NASKAH		
290.	PENYUSUN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN		
291.	PENYUSUN PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA		
292.	PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA		
293.	PENYUSUN PERKEMBANGAN HARGA DAN PENGKAJIAN PASAR		
294.	PENYUSUN PERKEMBANGAN TRANSAKSI DAN LAPORAN		
295.	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN		
296.	PENYUSUN PROGRAM KREATIVITAS DAN INOVASI		
297.	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN		
298.	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA		
299.	PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		
300.	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA		
301.	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN		
302.	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN		
303.	PENYUSUN RENCANA KELEMBAGAAN PASAR HASIL PERIKANAN		
304.	PENYUSUN RENCANA KERJASAMA KELEMBAGAAN		
305.	PENYUSUN RENCANA MUTASI		
306.	PENYUSUN RENCANA PELAYANAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH		

<p>307. PENYUSUN RENCANA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA</p> <p>308. PENYUSUN RENCANA PENGAWASAN</p> <p>309. PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT</p> <p>310. PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>311. PENYUSUN RENCANA SARANA PENGEMBANGAN USAHA</p> <p>312. PENYUSUN RENCANA TATA RUANG</p> <p>313. PENYUSUN RENCANA TATA RUANG DAN ZONASI</p> <p>314. PENYUSUN RISALAH</p> <p>315. PENYUSUN TEKNIS PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR DAN NON APARATUR</p> <p>316. PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <p>317. PEREKAYASA LALU LINTAS (<i>TRAFFIC ENGINEER</i>)</p> <p>318. NAMA JABATAN PELAKSANA LAINNYA DENGAN MINIMAL PENDIDIKAN D-IV/S1 YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH</p>			
<p>1. AJUDAN</p> <p>2. KARTOGRAFER</p> <p>3. OPERATOR KOMPUTER GRAFIS</p> <p>4. OPERATOR PENGEMBANGAN SARANA IPTEK</p> <p>5. OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI</p> <p>6. PENGATUR LALU LINTAS JALAN</p> <p>7. PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</p> <p>8. PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI</p> <p>9. PENGELOLA AKUNTANSI</p> <p>10. PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN</p> <p>11. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN</p> <p>12. PENGELOLA BAHAN PUSTAKA</p> <p>13. PENGELOLA BANTUAN HUKUM</p> <p>14. PENGELOLA BANTUAN KEAGAMAAN</p> <p>15. PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH</p> <p>16. PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA</p> <p>17. PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN</p> <p>18. PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPA BUMI DAN PATEN</p> <p>19. PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT</p> <p>20. PENGELOLA BIMBINGAN SOSIAL</p> <p>21. PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA</p> <p>22. PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN</p> <p>23. PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA</p> <p>24. PENGELOLA DATA</p> <p>25. PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI</p> <p>26. PENGELOLA DATA ANGKUTAN PERKOTAAN</p>	<p>690</p>	<p>655-850</p>	<p>6</p>

27.	PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL		
28.	PENGELOLA DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN		
29.	PENGELOLA DATA INFORMASI PERPAJAKAN		
30.	PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK		
31.	PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN		
32.	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
33.	PENGELOLA DATA KEKAYAAN BUDAYA		
34.	PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN BENIH		
35.	PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH		
36.	PENGELOLA DATA KREATIVITAS DAN INOVASI		
37.	PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN		
38.	PENGELOLA DATA PASCA PANEN		
39.	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
40.	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN		
41.	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA		
42.	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN		
43.	PENGELOLA DATA REKONSILIASI		
44.	PENGELOLA DATA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN		
45.	PENGELOLA DATA SENGKETA PERTANAHAN		
46.	PENGELOLA DATA TEMUAN PENGAWASAN		
47.	PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI		
48.	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI		
49.	PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM		
50.	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN		
51.	PENGELOLA DOKUMENTASI		
52.	PENGELOLA GAJI		
53.	PENGELOLA GEOSPASIAL		
54.	PENGELOLA IMB GEDUNG ATAU BANGUNAN		
55.	PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN		
56.	PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN		
57.	PENGELOLA JASA KONSTRUKSI		
58.	PENGELOLA KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH		
59.	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
60.	PENGELOLA KEBIDANAN		
61.	PENGELOLA KEFARMASIAN		
62.	PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN		
63.	PENGELOLA KEGIATAN SURVEI DAN PERENCANAAN		
64.	PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN		
65.	PENGELOLA KELENGKAPAN JALAN		
66.	PENGELOLA KEPEGAWAIAN		
67.	PENGELOLA KEPERAWATAN		
68.	PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL		
69.	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
70.	PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS		
71.	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL		
72.	PENGELOLA KETAHANAN PANGAN		

73.	PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN		
74.	PENGELOLA KEUANGAN		
75.	PENGELOLA KURIKULUM		
76.	PENGELOLA LABORATORIUM		
77.	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN		
78.	PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA		
79.	PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN		
80.	PENGELOLA LAYANAN KELUARGA BERENCANA, BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA		
81.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL		
82.	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		
83.	PENGELOLA LINGKUNGAN		
84.	PENGELOLA MANAJEMEN TRANSPORTASI ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN		
85.	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI		
86.	PENGELOLA MUTASI PENDUDUK		
87.	PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN		
88.	PENGELOLA OBJEK WISATA		
89.	PENGELOLA ORGANISME PENGGANGU TANAMAN		
90.	PENGELOLA PAJAK DAERAH		
91.	PENGELOLA PASCA PANEN		
92.	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB		
93.	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
94.	PENGELOLA PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA		
95.	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN		
96.	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH		
97.	PENGELOLA PEMASARAN		
98.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL		
99.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
100.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN		
101.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
102.	PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN		
103.	PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN		
104.	PENGELOLA PEMERLIHARAAN JALAN		
105.	PENGELOLA PEMELIRAHAN KONSERVASI LINGKUNGAN DAN KAWASAN KONSERVASI		
106.	PENGELOLA PEMELIHARAAN LABORATORIUM		
107.	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN		
108.	PENGELOLA PENATAAN SAMPAH		
109.	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA		
110.	PENGELOLA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
111.	PENGELOLA PENERANGAN JALAN		
112.	PENGELOLA PENGADAAN TANAH		
113.	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK		

114.	PENGELOLA PENGAMAT PENYAKIT DAN IMUNISASI		
115.	PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN		
116.	PENGELOLA PENGAWASAN		
117.	PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN		
118.	PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN		
119.	PENGELOLA PENGAWASAN PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN		
120.	PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
121.	PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN		
122.	PENGELOLA PENGGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN		
123.	PENGELOLA PENKAJIAN DAN PENELAAHAN HUKUM		
124.	PENGELOLA PENGUATAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		
125.	PENGELOLA PENILAI USAHA PERKEBUNAN		
126.	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR		
127.	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT		
128.	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN		
129.	PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
130.	PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN		
131.	PENGELOLA PERBENGGELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
132.	PENGELOLA PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
133.	PENGELOLA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN		
134.	PENGELOLA		
135.	PENGELOLA PERIZINAN		
136.	PENGELOLA PERJALANAN DINAS		
137.	PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL		
138.	PENGELOLA PERPUSTAKAAN		
139.	PENGELOLA PERSIDANGAN		
140.	PENGELOLA PERTANAHAN		
141.	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
142.	PENGELOLA PESERTA DIDIK		
143.	PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN		
144.	PENGELOLA POLIKLINIK		
145.	PENGELOLA PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA		
146.	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN		
147.	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN		
148.	PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN		
149.	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI PARIWISATA		
150.	PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK		
151.	PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH		
152.	PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
153.	PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM		
154.	PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH		
155.	PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN		

156.	PENGELOLA RUMAH TANGGA			
157.	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR			
158.	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMU			
159.	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN			
160.	PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN			
161.	PENGELOLA SARANA WISATA			
162.	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU			
163.	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN			
164.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS			
165.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN			
166.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN			
167.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN			
168.	PENGELOLA SITUS ATAU WEB			
169.	PENGELOLA SURAT			
170.	PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN			
171.	PENGELOLA TEKNIK SURVEI ANGKUTAN PERKOTAAN			
172.	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI			
173.	PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN			
174.	PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN			
175.	PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN			
176.	PENGELOLA WISMA			
177.	PENGELOLA BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI			
178.	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA			
179.	PENGELOLA BAHAN PENANGGULANGAN BENCANA			
180.	PENGELOLA DAFTAR GAJI			
181.	PENGOLAH DATA			
182.	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN			
183.	PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN			
184.	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN			
185.	PENGOLAH DATA INVESTIGAS INTERNAL			
186.	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN			
187.	PENGOLAH DATA LAPORAN KAS			
188.	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN			
189.	PENGOLAH DATA PELAYANAN			
190.	PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK			
191.	PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK			
192.	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN			
193.	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN			
194.	PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN			
195.	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI			
196.	PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN			
197.	PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN			

<p>198. PENGOLAH KONTEN MEDIA SOSIAL 199. PENGOLAH MAKANAN 200. PETUGAS PROTOKOL 201. PRANATA ACARA 202. PRANATA BARANG DAN JASA 203. PRANATA BENCANA 204. PRANATA KEARSIPAN 205. PRANATA KOPERASI 206. PRANATA LABORATORIUM KEARSIPAN 207. PRANATA PEMADAM KEBAKARAN 208. PRANATA REPRODUKSI ARSIP 209. SEKRETARIS 210. TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 211. VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN 212. VERIFIKATOR KEUANGAN 213. NAMA JABATAN PELAKSANA LAINNYA DENGAN MINIMAL PENDIDIKAN D-III YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH</p>			
<p>1. JURU MESIN 2. JURU SURVEI PERMUKIMAN PERUMAHAN 3. KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN 4. OPERATOR ALAT BERAT 5. OPERATOR CONSOLE 6. OPERATOR JEMBATAN TIMBANG 7. OPERATOR MESIN 8. OPERATOR SPEEDBOAT 9. PELATIH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10. PEMELIHARA BANGUNAN 11. PEMELIHARA JALAN 12. PEMELIHARA PENERANGAN JALAN 13. PEMELIHARA PERALATAN 14. PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA 15. PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN 16. PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN ANAK 17. PENGADMINISTRASI ANGGARAN 18. PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI 19. PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI 20. PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK 21. PENGADMINISTRASI IMB GEDUNG ATAU BANGUNAN 22. PENGADMINISTRASI IZIN USAHA 23. PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA 24. PENGADMINISTRASI KARCIS 25. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 26. PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 27. PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH</p>	<p>490</p>	<p>455-650</p>	<p>5</p>

28.	PENGADMINISTRASI KESISWAAN		
29.	PENGADMINISTRASI KEUANGAN		
30.	PENGADMINISTRASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		
31.	PENGADMINISTRASI KURIKULUM		
32.	PENGADMINISTRASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING		
33.	PENGADMINISTRASI OTONOMI DAERAH		
34.	PENGADMINISTRASI PAJAK		
35.	PENGADMINISTRASI PELATIHAN		
36.	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
37.	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
38.	PENGADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
39.	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN		
40.	PENGADMINISTRASI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR		
41.	PENGADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
42.	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM		
43.	PENGADMINISTRASI PERIZINAN		
44.	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN		
45.	PENGADMINISTRASI PERSURATAN		
46.	PENGADMINISTRASI PERTANAHAN		
47.	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI		
48.	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA		
49.	PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA		
50.	PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN		
51.	PENGADMINISTRASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR		
52.	PENGADMINISTRASI UMUM		
53.	PENGAWAS OLAH RAGA		
54.	PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN		
55.	PENILIK JALAN		
56.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR		
57.	PRANATA JAMUAN		
58.	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
59.	REGISTRAR		
60.	TEKNISI AIR		
61.	TEKNISI GEDUNG ATAU BANGUNAN		
62.	TEKNISI JARINGAN INSTALASI		
63.	TEKNISI KECIPTAKARYAAN		
64.	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN		
65.	TEKNISI MESIN		
66.	TEKNISI PERALATAN DAN MESIN		
67.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA		
68.	NAMA JABATAN PELAKSANA KELAS 5 LAINNYA DENGAN MINIMAL PENDIDIKAN SMA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG		

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH				
PENGEMUDI AMBULAN		440	375-450	4
1. BINATU RUMAH SAKIT 2. JURU PUNGUT KEBERSIHAN 3. JURU PUNGUT RETRIBUSI 4. PEMULASARAN JENAZAH 5. PENAGIH RETRIBUSI 6. PENGEMUDI 7. PERAWAT TERNAK 8. PETUGAS KEAMANAN 9. PETUGAS UKUR 10. NAMA JABATAN PELAKSANA KELAS 3 LAINNYA DENGAN MINIMAL PENDIDIKAN SMA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH		340	305-370	3
1. PRAMU BAKTI 2. PRAMU BENIH IKAN 3. PRAMU KEBERSIHAN 4. PRAMU PEMAKAMAN 5. PRAMU TAMAN 6. NAMA JABATAN PELAKSANA KELAS 1 LAINNYA DENGAN MINIMAL PENDIDIKAN SMA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH		190	190-240	1

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN